

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, 2019. "*Penelitian Hukum Normatif*", Depok : PT. Raja grafindo Persada.

Saleh, dkk, 2017, "*Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Jimly, Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Filmon, Mikson, Polin, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Malang : Media Nusa Creative.

Syamsiar Sjamsuddin Indradi, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Malang : Setara Press.

Sumber Jurnal :

Moh. Saleh, Hufron, Syofyan Hadi, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 2, September 2021.

Jonathan Galant Dewandaru, Muh. Ilham, Romly Arsyad, "Strategi badan pengawas pemilu dalam pengawasan keterlibatan aparatur sipir negara (ASN) pada pemilihan umum di provinsi jawa barat", *jurnal visioner*, Volume 13, Nomor 1, April 2021.

Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Paradigma makna final dan mengikat putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu”, *Jurnal Hukum*, Volume 37, Nomor 2, Desember 2021.

Dedy syaputra, Muhammad rajief,”Tugas dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu”, *Jurnal pendidikan dan konseling*, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2022.

Rahim H Jangi, “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *thesis*, Tahun 2017.

William Hendri, “Tinjauan yuridis kewenangan dkpp menurut undang-undang nomor 15 tahun 2011 terhadap putusan dkpp nomor : 23 -25/dkpp-pke-i/2012”, *Jurnal selat*, Volume 2, Nomor 1, oktober 2014.

Tengku Erwinsyahbana, “Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”, *Artikel Ilmiah*, November 2015.

Masrufah1, Arif Wibowo, “Perihal Putusan dan Upaya Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2023.

Sumber Undang-Undang :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
4. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Sumber Putusan :

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 05/G/2015/PTUN.Mks
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor :
112/B/2015/PT.TUN.MKS.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 181 /K/TUN/2016